

Model Akuntansi Digital Berbasis Komunitas untuk Penguatan Tata Kelola Rantai Nilai Ekonomi Hijau: Studi *Community-Based Tourism* di Desa Oluhuta

Fitria Akibun^{1*}, Ria Anggita Zen², Non Endey³, Moh. Ramdhan Arif Kaluku⁴

^{1,2,3} Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Administrasi dan Ilmu Sosial,
Universitas Bina Taruna Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

⁴ Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo,
Indonesia

fitria.unbita@gmail.com

Corresponding Author

Submitted : Aug 25, 2026

Accepted : September 9, 2026

Published : October 1, 2026

ABSTRACT

This study aims to identify a community-based digital accounting model for strengthening green-economy value-chain governance through Community-Based Tourism (CBT) in Oluhuta Village. A convergent mixed-methods design with qualitative dominance was employed. Data were collected through in-depth interviews with 20 informants, observation, focus group discussions, documentation, and questionnaires. Quantitative data were analyzed descriptively, while qualitative data were examined through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings show that 65% of respondents still rely on manual bookkeeping, only 35% use digital devices for financial recording, and 15% use financial-management applications. Although all respondents own smartphones and 90% have internet access, the use of technology for accounting functions remains limited. Meanwhile, 90% require periodic financial reports, whereas only 30% currently prepare periodic summaries or reports. Integration of qualitative and quantitative evidence produced a model consisting of six processes: transaction recording, information processing, financial reporting, community verification and supervision, information distribution, and decision making. The model is guided by participatory, simple and accessible, transparent, accountable, integrated, and sustainability-oriented principles. The findings indicate that digital accounting in CBT should be treated as a socio-technical governance process linking technology, stakeholder roles, value-flow traceability, and community accountability rather than merely replacing manual records with electronic media.

Keywords: Accountability; Community-Based Tourism; Digital Accounting; Green Economy; Transparency

PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis komunitas (*Community-Based Tourism*—CBT) merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan, serta pemanfaatan manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata. Orientasi CBT dengan demikian tidak terbatas pada peningkatan jumlah kunjungan atau penerimaan ekonomi, tetapi juga mencakup partisipasi masyarakat, pemberdayaan, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan. Jackson (2025) menegaskan bahwa CBT berkaitan dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama melalui pengurangan kemiskinan dan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sejalan dengan itu, Abreu et al. (2024) menunjukkan bahwa praktik CBT dapat berkontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* ketika komunitas lokal ditempatkan sebagai pelaku utama pengelolaan destinasi. Dalam konteks Indonesia, keberlanjutan desa wisata berbasis CBT juga dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan pengelolaan destinasi (Raynaldi et al., 2024).

Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, merupakan wilayah pesisir dengan potensi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Studi mengenai Pantai Oluhuta menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, tetapi pengelolaannya masih membutuhkan penguatan sinergi antara masyarakat dan pemerintah agar manfaat ekonomi dapat berkembang secara lebih optimal dan inklusif (Akibun et al., 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengembangan pariwisata Oluhuta tidak berhenti pada kemampuan destinasi menciptakan aktivitas ekonomi. Ketika manfaat pariwisata dihasilkan melalui keterlibatan pengelola wisata, pelaku UMKM, kelompok sadar wisata, pemerintah desa, dan masyarakat lokal, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa transaksi dan manfaat ekonomi yang tersebar di antara berbagai aktor tersebut dapat dicatat, dikonsolidasikan, dipertanggungjawabkan, dan diinformasikan secara memadai.

Persoalan tersebut menjadi penting karena tata kelola CBT pada dasarnya melibatkan struktur ekonomi yang tidak selalu terpusat pada satu entitas formal. Penerimaan, pengeluaran, transaksi usaha, penggunaan fasilitas, serta manfaat ekonomi dapat berada pada aktor yang berbeda dan dikelola melalui mekanisme yang berbeda pula. Dalam kondisi demikian, peningkatan aktivitas ekonomi belum dengan sendirinya menjamin transparansi mengenai asal, penggunaan, dan distribusi nilai yang tercipta. Kesenjangan antara berkembangnya aktivitas ekonomi komunitas dan tersedianya mekanisme informasi yang mampu menjelaskan aliran nilai tersebut menjadi persoalan tata kelola yang relevan bagi keberlanjutan CBT. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berbasis komunitas membutuhkan tidak hanya partisipasi dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga sistem informasi yang memungkinkan komunitas mengetahui bagaimana nilai dihasilkan, dikelola, didistribusikan, dan dipertanggungjawabkan.

Kebutuhan tersebut semakin relevan ketika pengembangan pariwisata ditempatkan dalam kerangka ekonomi hijau. Pariwisata berkelanjutan menuntut integrasi antara penciptaan nilai ekonomi, kepentingan sosial masyarakat, dan perlindungan sumber daya lingkungan. Roblek et al. (2021) menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata berkelanjutan semakin berkaitan dengan perubahan model bisnis, pemanfaatan teknologi, investasi hijau, standar keberlanjutan, dan pelaporan keberlanjutan. Sementara itu, Wang et al. (2022) menegaskan pentingnya pemetaan proses penciptaan dan aliran nilai dalam aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam konteks CBT, perspektif tersebut mengandung implikasi bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan destinasi menciptakan manfaat ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan tata kelola komunitas untuk membuat aliran manfaat tersebut dapat dicatat, ditelusuri, diawasi, dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Salah satu mekanisme yang dapat mendukung fungsi tersebut adalah sistem akuntansi dan pengelolaan informasi keuangan. Dalam konteks komunitas, informasi akuntansi tidak semata-mata berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai infrastruktur tata kelola yang menghubungkan transaksi dengan pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pengambilan keputusan. Persoalannya menjadi lebih kompleks ketika informasi tersebut berasal dari banyak aktor dengan kapasitas, kepentingan, dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, kebutuhan akuntansi dalam CBT bukan hanya bagaimana transaksi dapat dicatat, tetapi juga bagaimana informasi dari berbagai sumber dapat diolah, diverifikasi, didistribusikan, dan digunakan sebagai dasar pengawasan serta pengambilan keputusan komunitas.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk memperkuat mekanisme tersebut. Huy dan Phuc (2025) menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi digital berkaitan dengan inovasi model bisnis berkelanjutan dan didukung oleh keberadaan ekosistem digital. Argento et al. (2025) selanjutnya menunjukkan bahwa transformasi digital membawa konsekuensi terhadap proses akuntansi, audit, dan akuntabilitas, sehingga digitalisasi tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan perangkat. Alassuli et al. (2025) juga menemukan bahwa transformasi digital akuntansi berpotensi meningkatkan transparansi keuangan ketika didukung oleh tata kelola yang memadai. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai digitalisasi akuntansi tidak terletak semata-mata pada penggantian media pencatatan manual, tetapi pada kemampuannya meningkatkan kualitas dan keterhubungan proses informasi yang mendukung tata kelola.

Namun, hubungan antara digitalisasi dan tata kelola tidak bersifat otomatis. Du et al. (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara digitalisasi keuangan dan transparansi informasi akuntansi

dapat bersifat nonlinier; peningkatan kompleksitas dan beban informasi justru dapat mengurangi manfaat digitalisasi. Artinya, efektivitas teknologi bergantung pada kesesuaiannya dengan kebutuhan informasi, kapasitas pengguna, serta struktur kelembagaan tempat teknologi diterapkan. Kondisi tersebut menjadi semakin penting dalam konteks CBT karena komunitas bukan merupakan kelompok yang homogen. Fan et al. (2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola pariwisata perdesaan dipengaruhi oleh kemampuan, pengetahuan, kesempatan, kemauan, dan keterikatan mereka. Dengan demikian, digitalisasi akuntansi pada CBT perlu dipahami sebagai persoalan sosio-teknis yang mempertemukan teknologi dengan kapasitas pengguna, struktur peran, mekanisme pengawasan, dan kebutuhan informasi komunitas.

Meskipun literatur telah berkembang pada masing-masing bidang tersebut, masih terdapat keterbatasan konseptual yang penting. Studi digitalisasi akuntansi terutama menjelaskan hubungan teknologi dengan kualitas informasi, transparansi, tata kelola, transformasi organisasi, dan inovasi model bisnis (Alassuli et al., 2025; Argento et al., 2025; Du et al., 2024; Huy & Phuc, 2025). Kerangka tersebut umumnya memandang digitalisasi melalui struktur organisasi atau unit ekonomi yang relatif dapat diidentifikasi. Sebaliknya, literatur CBT lebih banyak menjelaskan partisipasi masyarakat, pemberdayaan, distribusi manfaat, keberlanjutan destinasi, dan tata kelola lingkungan (Abreu et al., 2024; Fan et al., 2024; Jackson, 2025; Raynaldi et al., 2024). Literatur tersebut kuat dalam menjelaskan siapa yang seharusnya berpartisipasi dan mengapa partisipasi penting, tetapi belum secara memadai menjelaskan bagaimana partisipasi tersebut diterjemahkan ke dalam tata kelola informasi keuangan yang menghubungkan transaksi, pelaporan, verifikasi, pengawasan, dan distribusi informasi antaraktor komunitas. Pada saat yang sama, perspektif rantai nilai berkelanjutan mampu menjelaskan hubungan aktor dan penciptaan manfaat, tetapi belum memberikan mekanisme akuntansi yang secara khusus memungkinkan aliran nilai tersebut ditelusuri dan dipertanggungjawabkan pada tingkat komunitas.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian tidak semata-mata terletak pada belum banyaknya penelitian yang menggabungkan akuntansi digital dan CBT, tetapi pada belum memadainya penjelasan mengenai mekanisme tata kelola informasi keuangan yang mampu menghubungkan aktor komunitas, transaksi, pelaporan, verifikasi, distribusi informasi, dan keterlacakan manfaat dalam rantai nilai ekonomi hijau. Kesenjangan tersebut penting karena penggunaan teknologi tanpa struktur informasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas berpotensi hanya memindahkan pencatatan dari media manual ke media digital tanpa memperbaiki transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti tata kelola berbasis komunitas.

Atas dasar kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada konseptualisasi model akuntansi digital berbasis komunitas sebagai arsitektur tata kelola informasi keuangan, bukan sekadar sebagai sistem atau aplikasi pencatatan digital. Model tersebut menempatkan teknologi sebagai instrumen yang menghubungkan aktor, proses informasi, mekanisme verifikasi dan pengawasan, distribusi informasi, serta penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan komunitas. Dalam perspektif rantai nilai ekonomi hijau, pendekatan ini juga menempatkan keterlacakan aliran nilai sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Posisi tersebut membedakan penelitian ini dari studi akuntansi digital yang terutama berorientasi pada teknologi dan kinerja organisasi serta dari studi CBT yang terutama memusatkan perhatian pada partisipasi dan keberlanjutan destinasi.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan merumuskan model akuntansi digital berbasis komunitas yang sesuai dengan karakteristik rantai nilai ekonomi hijau dalam pengelolaan CBT di Desa Oluhuta. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian diarahkan pada tiga sasaran analitis, yaitu mengidentifikasi praktik pengelolaan dan pencatatan informasi keuangan yang berlangsung dalam aktivitas pariwisata komunitas; menganalisis kebutuhan informasi, kesiapan, tantangan, dan pembagian peran antaraktor dalam penerapan akuntansi digital; serta menyintesis komponen dan proses yang diperlukan untuk membentuk model akuntansi digital berbasis komunitas. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan akuntansi digital sebagai mekanisme tata kelola informasi antarpemangku kepentingan dalam CBT serta kontribusi praktis bagi penguatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan manfaat ekonomi pada pengelolaan pariwisata desa.

STUDI LITERATUR

Stakeholder Theory dan Tata Kelola Informasi Berbasis Komunitas

Stakeholder Theory menjadi perspektif teoretis utama untuk menjelaskan keterlibatan berbagai aktor dalam tata kelola informasi keuangan pariwisata berbasis komunitas. Freeman (1984) memandang organisasi sebagai sistem hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas dan penciptaan nilai, sedangkan Donaldson dan Preston (1995) menjelaskan bahwa hubungan stakeholder dapat dipahami melalui dimensi deskriptif, instrumental, dan normatif. Perspektif tersebut relevan dalam konteks *Community-Based Tourism* (CBT) karena pengelolaan destinasi tidak hanya melibatkan satu organisasi atau pengelola, tetapi berbagai aktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, kewenangan, kapasitas, dan kebutuhan informasi yang berbeda.

Dalam konteks tata kelola informasi keuangan berbasis komunitas, perbedaan tersebut berarti bahwa stakeholder tidak harus menjalankan fungsi yang sama dalam keseluruhan proses akuntansi. Tata kelola informasi dapat dipahami sebagai suatu siklus yang dimulai dari munculnya transaksi, pencatatan dan pengolahan data, penyusunan laporan, verifikasi bukti, distribusi informasi, pengawasan, hingga penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan hanya siapa stakeholder yang terlibat, tetapi bagaimana tanggung jawab dan kebutuhan informasi didistribusikan di antara stakeholder pada setiap fungsi tersebut. Perspektif ini memberikan dasar untuk menganalisis struktur aktor, pembagian tanggung jawab, akses terhadap informasi, serta mekanisme verifikasi dan pengawasan dalam model akuntansi digital berbasis komunitas.

Dalam konteks Desa Oluhuta, stakeholder yang relevan mencakup pengelola wisata desa, pelaku UMKM pariwisata, Pokdarwis, pemerintah desa, dan masyarakat lokal. Keberadaan beberapa kelompok stakeholder tersebut menunjukkan bahwa desain akuntansi digital berbasis komunitas tidak cukup hanya menentukan teknologi atau aplikasi yang digunakan. Model juga perlu menjelaskan siapa yang menghasilkan informasi, siapa yang mengolah dan memverifikasi informasi, siapa yang memperoleh akses terhadap informasi, serta bagaimana informasi tersebut digunakan untuk pengawasan dan pengambilan keputusan. Dengan posisi tersebut, *Stakeholder Theory* menyediakan dasar analitis untuk memahami tata kelola informasi keuangan sebagai proses relasional yang menghubungkan berbagai aktor dalam satu siklus pertanggungjawaban.

Akuntansi Digital, Transparansi, dan Akuntabilitas

Akuntansi digital dalam penelitian ini dipahami sebagai pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pelaporan, verifikasi, dan distribusi informasi keuangan. Digitalisasi akuntansi karena itu tidak hanya menunjukkan perubahan media pencatatan dari manual menjadi elektronik, tetapi juga perubahan dalam cara informasi dihasilkan, diakses, diverifikasi, digunakan dalam pengendalian, dan dipertanggungjawabkan. Huy dan Phuc (2025) menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi digital berkaitan dengan pengembangan inovasi model bisnis berkelanjutan, sedangkan Argento et al. (2025) menunjukkan bahwa transformasi digital membawa konsekuensi terhadap praktik akuntansi, audit, dan akuntabilitas.

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan dan ketersediaan informasi yang memungkinkan pihak berkepentingan mengetahui bagaimana sumber daya ekonomi diperoleh, digunakan, dan didistribusikan. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pihak yang memperoleh kewenangan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan pengelolaan. Dalam sistem berbasis komunitas, transparansi tidak cukup hanya ditunjukkan oleh keberadaan laporan keuangan. Informasi juga harus tersedia dalam bentuk yang dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh stakeholder sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Alassuli et al. (2025) menunjukkan bahwa transformasi digital akuntansi dapat mendukung transparansi keuangan apabila disertai tata kelola yang memadai. Namun, Du et al. (2024) menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi tidak selalu menghasilkan transparansi yang lebih tinggi karena kompleksitas dan beban informasi dapat mengurangi manfaat teknologi bagi pengguna. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas akuntansi digital ditentukan bukan hanya oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan kapasitas pengguna dan

struktur tata kelola. Oleh sebab itu, kesederhanaan, aksesibilitas, kejelasan informasi, serta kesesuaian dengan kemampuan pengguna ditempatkan sebagai prinsip penting dalam pengembangan model akuntansi digital berbasis komunitas.

Dalam penelitian ini, hubungan antara akuntansi digital, transparansi, dan akuntabilitas dipahami sebagai suatu mekanisme yang saling berkaitan. Digitalisasi menyediakan sarana untuk menghasilkan dan menghubungkan informasi, transparansi menentukan keterbukaan dan akses terhadap informasi tersebut, sedangkan akuntabilitas membutuhkan mekanisme dokumentasi, pelaporan, verifikasi, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, teknologi digital tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai infrastruktur yang mendukung tata kelola informasi keuangan.

Community-Based Tourism, Partisipasi, dan Rantai Nilai Ekonomi Hijau

Community-Based Tourism menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor penting dalam pengembangan dan pengelolaan aktivitas pariwisata. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima dampak atau manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta distribusi manfaat. Tosun (2006) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat berlangsung pada tingkatan yang berbeda dan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan serta kepentingan berbagai kelompok. Giampiccoli dan Saayman (2018) mengaitkan CBT dengan pemberdayaan masyarakat, pemerataan manfaat, kepemilikan lokal, keadilan sosial, dan pembangunan komunitas.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip partisipasi CBT digunakan untuk membaca keterlibatan komunitas tidak hanya dalam pengelolaan aktivitas pariwisata, tetapi juga dalam tata kelola informasi yang mendukung aktivitas tersebut. Partisipasi dalam tata kelola informasi dapat berbentuk penyediaan data transaksi, pencatatan, penyampaian kebutuhan informasi, verifikasi, pengawasan, penerimaan informasi, hingga penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Perspektif ini penting karena partisipasi ekonomi tanpa akses terhadap informasi mengenai bagaimana nilai diperoleh dan didistribusikan belum sepenuhnya menjamin transparansi ataupun akuntabilitas dalam pengelolaan CBT.

Rantai nilai pariwisata menggambarkan hubungan antara aktivitas dan aktor yang berkontribusi terhadap penciptaan serta distribusi nilai. Dalam perspektif keberlanjutan, analisis rantai nilai tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat sosial dan konsekuensi lingkungan. Lara-Morales dan Clarke (2024) menunjukkan bahwa analisis rantai nilai pariwisata berkelanjutan dapat digunakan untuk memahami kontribusi aktivitas pariwisata terhadap pembangunan berkelanjutan dan manfaat bagi komunitas lokal. Rivera dan Gutierrez (2019) juga menekankan pentingnya identifikasi aktor serta hubungan antaraktor dalam *sustainable ecotourism value chain*.

Dalam konteks tersebut, informasi akuntansi memiliki fungsi strategis karena penciptaan dan distribusi nilai hanya dapat dinilai secara memadai apabila transaksi dapat diidentifikasi dan ditelusuri. Oleh karena itu, akuntansi digital diposisikan sebagai mekanisme yang memungkinkan informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, transaksi antaraktor, dan distribusi manfaat dikumpulkan, diklasifikasikan, dilaporkan, diverifikasi, serta ditelusuri. Kemampuan tersebut membentuk dasar bagi keterlacakan aliran nilai (*value traceability*), yaitu kemampuan menghubungkan nilai ekonomi dengan sumber transaksi, proses pengelolaan, serta stakeholder yang menghasilkan atau menerima manfaat.

Integrasi Konseptual

Berdasarkan perspektif teoretis dan penelitian terdahulu, model akuntansi digital berbasis komunitas dalam penelitian ini dibangun melalui integrasi empat unsur utama, yaitu aktor komunitas, teknologi digital, tata kelola informasi keuangan, dan keberlanjutan rantai nilai. Keempat unsur tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk mekanisme yang saling berkaitan dalam pengelolaan informasi ekonomi pada CBT.

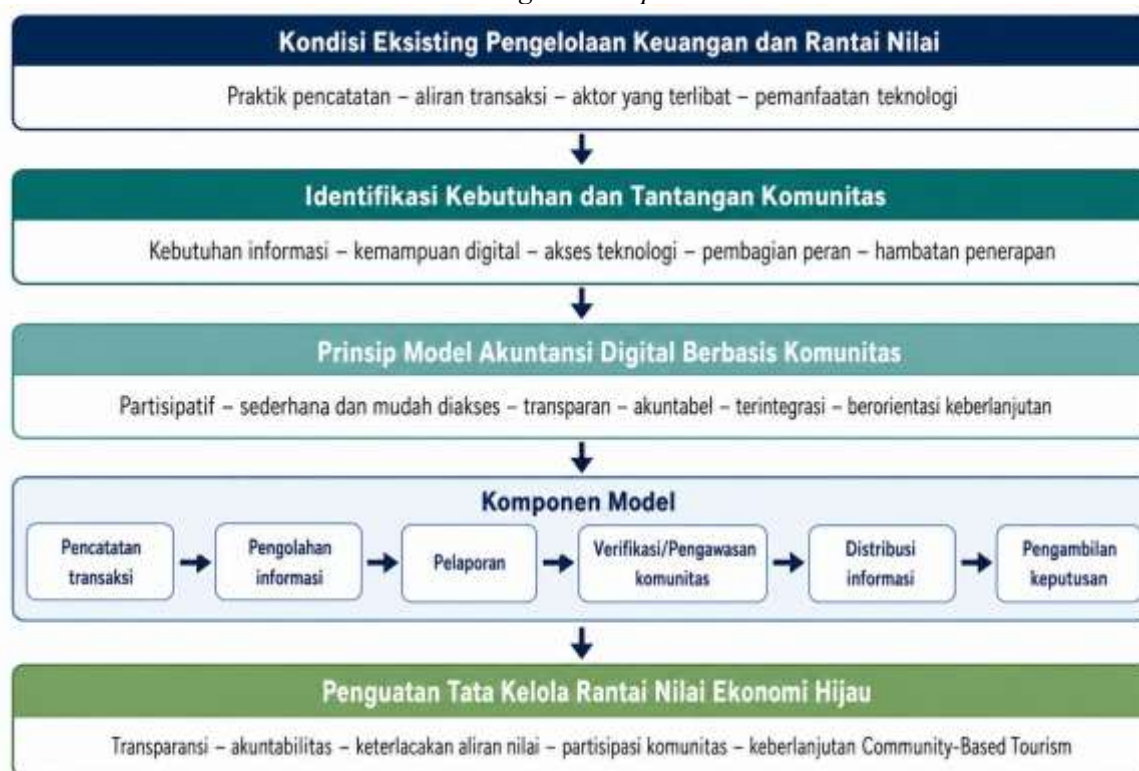
Stakeholder Theory memberikan dasar untuk mengidentifikasi aktor, kepentingan, kebutuhan informasi, kewenangan, serta pembagian tanggung jawab. Perspektif CBT menjelaskan pentingnya partisipasi dan posisi komunitas dalam pengelolaan aktivitas serta manfaat pariwisata. Akuntansi

digital menyediakan mekanisme untuk mencatat, mengolah, menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan informasi keuangan. Sementara itu, perspektif rantai nilai ekonomi hijau menempatkan informasi tersebut dalam konteks penciptaan, distribusi, dan keterlacakan manfaat ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan.

Integrasi tersebut membentuk logika bahwa aktivitas ekonomi menghasilkan transaksi dan aliran nilai; transaksi menghasilkan kebutuhan informasi; informasi membutuhkan proses pencatatan, pengolahan, pelaporan, dan verifikasi; sedangkan informasi yang telah dapat dipercaya selanjutnya didistribusikan dan digunakan oleh stakeholder untuk pengawasan serta pengambilan keputusan. Teknologi digital berfungsi sebagai instrumen yang mendukung keterhubungan proses tersebut. Dengan demikian, digitalisasi akuntansi dalam CBT dipahami sebagai mekanisme tata kelola sosio-teknis yang mempertemukan teknologi, struktur stakeholder, proses informasi, serta keterlacakan distribusi nilai.

Kerangka tersebut tidak dimaksudkan sebagai model hubungan kausal yang diuji secara statistik. Kerangka konseptual digunakan sebagai dasar analitis untuk mengidentifikasi kondisi aktual pengelolaan keuangan, kebutuhan informasi, kesiapan dan tantangan digitalisasi, pembagian peran stakeholder, serta komponen yang diperlukan dalam pembentukan model akuntansi digital berbasis komunitas. Dengan posisi tersebut, model yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan pencatatan transaksi, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, partisipasi komunitas, dan keterlacakan manfaat dalam tata kelola rantai nilai ekonomi hijau.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Kerangka konseptual menunjukkan bahwa pengembangan model tidak dimulai dari pemilihan aplikasi atau teknologi tertentu, tetapi dari identifikasi kondisi eksisting pengelolaan keuangan dan rantai nilai komunitas. Tahap tersebut dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan informasi, kesiapan dan tantangan komunitas, serta pembagian peran stakeholder. Temuan tersebut menjadi dasar dalam penetapan prinsip model dan penyusunan proses pengelolaan informasi yang mencakup pencatatan, pengolahan, pelaporan, verifikasi dan pengawasan, distribusi informasi, serta penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Keseluruhan proses diarahkan pada penguatan transparansi, akuntabilitas, keterlacakan aliran nilai, partisipasi komunitas, dan keberlanjutan tata kelola CBT.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain konvergen (*convergent mixed methods design*) dan dominasi pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan, aliran transaksi, pemanfaatan teknologi, kebutuhan informasi, peran aktor komunitas, tantangan digitalisasi, transparansi, akuntabilitas, serta karakteristik rantai nilai ekonomi hijau. Sementara itu, data kuantitatif digunakan sebagai bukti pendukung untuk menggambarkan kecenderungan praktik pencatatan, pemanfaatan teknologi, kesiapan digital, kebutuhan informasi, serta kondisi transparansi dan akuntabilitas. Dalam desain konvergen, data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan pada periode penelitian yang sama, dianalisis menggunakan prosedur masing-masing, kemudian diintegrasikan pada tahap interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena penelitian (Creswell & Plano Clark, 2018; Fetter et al., 2013).

Penelitian dilaksanakan di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Partisipan penelitian berjumlah 20 orang yang berasal dari lima kelompok aktor dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, yaitu 5 orang pengelola wisata desa, 7 orang pelaku UMKM pariwisata, 4 orang anggota Pokdarwis, 2 orang aparatur pemerintah desa, serta 2 orang tokoh atau masyarakat lokal. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan *purposive sampling* karena penelitian membutuhkan individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung terhadap aktivitas pariwisata dan pengelolaan ekonomi lokal (Palinkas et al., 2015). Kriteria pemilihan meliputi keterlibatan langsung dalam aktivitas pariwisata, pengalaman atau pemahaman mengenai pencatatan dan pengelolaan keuangan, pengetahuan terhadap aktivitas ekonomi lokal, serta kesediaan memberikan informasi penelitian. Pada komponen kualitatif, partisipan berperan sebagai informan wawancara dan FGD, sedangkan pada komponen kuantitatif mereka memberikan respons terhadap kuesioner yang digunakan untuk memperoleh gambaran deskriptif mengenai kondisi yang diteliti.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dokumentasi, dan kuesioner. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali praktik pencatatan, aliran transaksi, kebutuhan informasi, pemanfaatan teknologi, pembagian peran, mekanisme pelaporan dan pengawasan, serta hambatan digitalisasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas ekonomi, proses transaksi, penggunaan teknologi, dan praktik pencatatan yang berlangsung pada tingkat komunitas. FGD digunakan untuk memperoleh pandangan kolektif mengenai kesiapan penggunaan teknologi, kebutuhan informasi, pembagian tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Dokumentasi meliputi catatan dan bukti transaksi, rekapitulasi keuangan, dokumen administrasi, profil desa, serta dokumentasi aktivitas pariwisata. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data deskriptif mengenai praktik pencatatan, akses dan pemanfaatan teknologi, kemampuan digital, kebutuhan informasi, tantangan digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Instrumen penelitian terdiri atas pedoman wawancara, pedoman FGD, lembar observasi, format dokumentasi, dan kuesioner. Pengembangan instrumen didasarkan pada tujuan penelitian dan dimensi kerangka konseptual yang meliputi praktik pencatatan dan pelaporan keuangan, aliran transaksi, keterlibatan aktor, pemanfaatan teknologi, kebutuhan informasi, kemampuan digital, pembagian peran, hambatan digitalisasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi komunitas, dan rantai nilai ekonomi hijau. Indikator kuesioner tidak dikembangkan untuk membentuk konstruk yang digunakan dalam pengujian hubungan kausal, tetapi digunakan sebagai indikator deskriptif untuk memetakan kondisi aktual komunitas. Bentuk pengukuran disesuaikan dengan karakteristik masing-masing indikator, terutama melalui kategori jawaban yang menunjukkan keberadaan praktik, kemampuan, kebutuhan, atau kondisi tertentu. Jawaban responden selanjutnya diklasifikasikan dan disajikan dalam bentuk frekuensi serta persentase.

Sebelum digunakan dalam pengumpulan data, instrumen melalui pengujian validitas untuk memastikan kesesuaian antara isi instrumen, tujuan penelitian, dimensi kerangka konseptual, dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penilaian terutama diarahkan pada relevansi butir pertanyaan dengan aspek yang diukur, kejelasan redaksi, keterpahaman pertanyaan, serta kesesuaiannya dengan karakteristik partisipan dan konteks pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Desa Oluhuta. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa

butir-butir instrumen yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data penelitian. Dengan karakteristik penelitian yang berorientasi pada eksplorasi dan pemetaan kondisi empiris, pengujian instrumen diarahkan pada kesesuaian substansi dan keterpahaman butir, bukan pada pembentukan konstruk statistik untuk pengujian hubungan antarvariabel.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa frekuensi dan persentase. Analisis kuantitatif tidak digunakan untuk menguji hipotesis, mengestimasi hubungan antarvariabel, atau melakukan generalisasi statistik, tetapi untuk memberikan gambaran terstruktur mengenai kondisi empiris yang mendukung interpretasi kualitatif. Persentase dihitung berdasarkan jumlah partisipan yang memberikan respons pada masing-masing kategori indikator dibandingkan dengan jumlah keseluruhan partisipan. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan pada praktik pencatatan, pemanfaatan teknologi, kebutuhan informasi, kesiapan digital, hambatan digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, hasil wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikodekan, dan dikelompokkan berdasarkan tema yang berkaitan dengan praktik pencatatan, penggunaan teknologi, kebutuhan informasi, kemampuan digital, pembagian peran, hambatan digitalisasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta rantai nilai ekonomi hijau. Pada tahap penyajian data, informasi disusun untuk mengidentifikasi pola, hubungan antaraktor, kesamaan, serta perbedaan perspektif yang muncul dari berbagai sumber. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara bertahap dan diverifikasi melalui perbandingan antarsumber dan antarteknik pengumpulan data.

Keabsahan data kualitatif diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengelola wisata desa, pelaku UMKM pariwisata, Pokdarwis, aparatur pemerintah desa, serta tokoh atau masyarakat lokal. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi hasil wawancara dengan hasil observasi, FGD, dan dokumentasi. Prosedur tersebut digunakan untuk mengidentifikasi konsistensi informasi sekaligus memahami perbedaan perspektif antaraktor dalam pengelolaan informasi keuangan pariwisata berbasis komunitas.

Integrasi data kualitatif dan kuantitatif dilakukan melalui mekanisme *merging* pada tahap interpretasi. Hasil statistik deskriptif dipertemukan dengan tema-tema kualitatif melalui *joint display* untuk mengidentifikasi konvergensi, komplementaritas, maupun perbedaan antara kedua jenis bukti (Fetters et al., 2013). Data kuantitatif mengenai praktik pencatatan dan penggunaan teknologi, misalnya, diinterpretasikan bersama dengan temuan kualitatif mengenai alasan, hambatan, dan pengalaman aktor dalam menjalankan praktik tersebut. Data mengenai kebutuhan informasi, transparansi, dan akuntabilitas juga dipertemukan dengan temuan kualitatif mengenai mekanisme pelaporan, verifikasi, pengawasan, pembagian tanggung jawab, dan akses informasi.

Hasil integrasi kedua jenis data selanjutnya menjadi dasar dalam menyintesis model akuntansi digital berbasis komunitas. Sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi keterkaitan antara kondisi aktual pengelolaan keuangan, kebutuhan informasi, kesiapan dan tantangan digitalisasi, struktur aktor, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pencatatan, pengolahan informasi, pelaporan keuangan, verifikasi dan pengawasan, distribusi informasi, dan pengambilan keputusan. Karena komponen kuantitatif digunakan secara deskriptif dan tidak diarahkan pada pengujian hubungan kausal, model yang dihasilkan diposisikan sebagai model konseptual berbasis integrasi bukti empiris dalam konteks Desa Oluhuta, bukan sebagai model kausal yang telah diuji secara statistik.

HASIL

Karakteristik Partisipan dan Praktik Pengelolaan Keuangan

Penelitian melibatkan 20 partisipan yang berasal dari lima kelompok aktor utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Desa Oluhuta. Pelaku UMKM pariwisata merupakan kelompok terbesar, yaitu sebanyak 7 orang (35%), diikuti pengelola wisata desa sebanyak 5 orang (25%), anggota Pokdarwis sebanyak 4 orang (20%), aparatur pemerintah desa sebanyak 2 orang (10%), serta tokoh atau masyarakat lokal sebanyak 2 orang (10%). Berdasarkan lama keterlibatan dalam aktivitas pariwisata, 70% partisipan telah terlibat sekurang-kurangnya selama empat tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan memiliki pengalaman langsung

yang memadai untuk memberikan informasi mengenai perkembangan aktivitas pariwisata dan praktik pengelolaan ekonomi di Desa Oluhuta

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kelompok Informan	Jumlah	Persentase	Peran Utama
Pengelola wisata desa	5	25%	Operasional destinasi dan transaksi
Pelaku UMKM pariwisata	7	35%	Penyedia barang dan jasa
Pokdarwis	4	20%	Koordinasi dan pengelolaan kegiatan
Aparatur pemerintah desa	2	10%	Administrasi, pembinaan, pengawasan
Tokoh/masyarakat lokal	2	10%	Partisipasi dan aktivitas ekonomi pendukung
Total	20	100%	-

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan masih didominasi oleh mekanisme manual. Sebanyak 13 responden (65%) menggunakan pencatatan manual, 4 responden (20%) menggunakan kombinasi pencatatan manual dan digital, sedangkan 3 responden (15%) telah menggunakan pencatatan digital. Dari aspek keteraturan, sebanyak 40% responden melakukan pencatatan secara rutin, sedangkan 60% belum melakukannya secara rutin. Penyimpanan bukti transaksi secara teratur dilakukan oleh 45% responden, penyusunan rekapitulasi atau laporan periodik dilakukan oleh 30%, dan pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi dilakukan oleh 40%. Pola tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan media pencatatan, tetapi juga dengan keteraturan pencatatan, dokumentasi transaksi, dan konsistensi praktik antaraktor.

Aliran Transaksi dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Aktivitas pariwisata di Desa Oluhuta membentuk aliran nilai yang melibatkan pengelola wisata, pelaku UMKM, Pokdarwis, pemerintah desa, masyarakat lokal, dan wisatawan. Pengelola wisata menerima nilai ekonomi dari penggunaan jasa dan fasilitas destinasi serta mengeluarkan biaya untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan. Pelaku UMKM memperoleh penerimaan melalui penjualan barang dan jasa dengan pengeluaran utama berupa bahan baku dan biaya operasional. Pokdarwis menjalankan fungsi koordinasi kegiatan, pemerintah desa berperan dalam pembinaan dan pengawasan, sedangkan masyarakat lokal terlibat melalui berbagai aktivitas ekonomi pendukung. Pemetaan terhadap aliran transaksi menunjukkan bahwa nilai ekonomi tersebar di antara beberapa aktor, sedangkan informasi transaksi masih dikelola pada tingkat masing-masing aktor sehingga belum membentuk aliran informasi keuangan yang terintegrasi.

Tabel 2. Praktik Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Indikator	Frekuensi	Persentase
Pencatatan manual	13	65%
Kombinasi manual dan digital	4	20%
Pencatatan digital	3	15%
Pencatatan rutin	8	40%
Bukti transaksi tersimpan teratur	9	45%
Laporan/rekap periodik	6	30%
Keuangan usaha dan pribadi terpisah	8	40%

Memiliki telepon pintar	20	100%
Memiliki akses internet	18	90%
Menggunakan pembayaran digital	13	65%
Perangkat digital untuk pencatatan	7	35%
Aplikasi pengelolaan keuangan	3	15%

Tabel 2 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara ketersediaan akses teknologi dan pemanfaatannya untuk fungsi akuntansi. Seluruh responden memiliki telepon pintar, 90% memiliki akses internet, dan 65% telah menggunakan pembayaran digital. Namun, hanya 35% responden yang menggunakan perangkat digital untuk pencatatan dan 15% yang menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi telah tersedia secara relatif luas, tetapi pemanfaatannya untuk pencatatan dan pengelolaan informasi keuangan masih terbatas.

Kebutuhan Informasi dan Kesiapan Digital Komunitas

Kebutuhan terhadap informasi keuangan berada pada tingkat yang relatif tinggi. Informasi mengenai penerimaan dan laporan keuangan periodik masing-masing dibutuhkan oleh 90% responden. Informasi mengenai pengeluaran dan distribusi manfaat ekonomi dibutuhkan oleh 85% responden, informasi saldo oleh 80%, sedangkan informasi transaksi antaraktor dibutuhkan oleh 75%. Pola tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan komunitas tidak terbatas pada pencatatan transaksi individual, tetapi juga mencakup informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui posisi penerimaan, pengeluaran, saldo, hubungan transaksi antaraktor, dan distribusi manfaat ekonomi.

Tabel 3. Kebutuhan Informasi dan Kesiapan Digital

Dimensi	Indikator	Persentase
Kebutuhan informasi	Penerimaan	90%
	Pengeluaran	85%
	Saldo	80%
	Transaksi antaraktor	75%
	Distribusi manfaat ekonomi	85%
	Laporan periodik	90%
Kesiapan digital	Menggunakan telepon pintar mandiri	85%
	Menggunakan aplikasi komunikasi	100%
	Mengirim dokumen digital	80%
	Pembayaran digital	65%
	Aplikasi pencatatan sederhana	40%
	Membuat rekapitulasi digital	35%

Kesiapan digital menunjukkan pola yang berbeda antara kemampuan menggunakan teknologi dasar dan kemampuan menggunakan teknologi untuk fungsi pencatatan keuangan. Seluruh responden mampu menggunakan aplikasi komunikasi, 85% mampu menggunakan telepon pintar secara mandiri, dan 80% mampu mengirim dokumen secara digital. Sebaliknya, hanya 40% yang mampu menggunakan aplikasi pencatatan sederhana dan 35% yang mampu membuat rekapitulasi digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan digital umum relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan digital yang berkaitan langsung dengan pengelolaan informasi keuangan.

Tantangan, Transparansi, dan Akuntabilitas

Integrasi hasil wawancara, FGD, dan kuesioner mengidentifikasi tujuh tantangan utama dalam penerapan akuntansi digital berbasis komunitas, yaitu literasi akuntansi, konsistensi pencatatan, kemampuan digital, mekanisme pengawasan, pembagian tanggung jawab, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, dan akses internet. Literasi akuntansi merupakan tantangan yang paling banyak diidentifikasi oleh responden (75%), diikuti konsistensi pencatatan (70%), kemampuan digital (65%), mekanisme pengawasan (60%), pembagian tanggung jawab (55%), adaptasi terhadap perubahan (45%), dan akses internet (35%). Pola tersebut memperlihatkan bahwa tantangan yang lebih dominan berkaitan dengan kemampuan, prosedur, dan tata kelola dibandingkan dengan ketersediaan akses internet.

Tabel 4. Tantangan serta Kondisi Transparansi dan Akuntabilitas

Kelompok	Dimensi	Persentase	Implikasi
Tantangan	Literasi akuntansi	75%	Sistem sederhana dan mudah dipahami
	Konsistensi pencatatan	70%	Prosedur pencatatan rutin
	Kemampuan digital	65%	Antarmuka mudah digunakan
	Mekanisme pengawasan	60%	Verifikasi transaksi dan laporan
	Pembagian tanggung jawab	55%	Struktur peran yang jelas
	Adaptasi perubahan	45%	Implementasi bertahap
	Akses internet	35%	Dapat digunakan pada konektivitas terbatas
Tata kelola	Akses informasi memadai	40%	Distribusi informasi perlu diperkuat
	Bukti transaksi memadai	45%	Dokumentasi transaksi
	Pelaporan periodik memadai	35%	Siklus pelaporan terjadwal
	Mekanisme verifikasi memadai	40%	Pemeriksaan catatan dan bukti
	Pengawasan transaksi memadai	45%	Pengawasan komunitas
	Kejelasan penanggung jawab	50%	Pembagian kewenangan

Tidak terdapat indikator transparansi dan akuntabilitas yang dinilai memadai oleh lebih dari separuh responden. Akses terhadap informasi dinilai memadai oleh 40% responden, ketersediaan bukti transaksi oleh 45%, pelaporan periodik oleh 35%, mekanisme verifikasi oleh 40%, pengawasan transaksi oleh 45%, dan kejelasan penanggung jawab oleh 50%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola ditemukan pada beberapa tahapan sekaligus, mulai dari dokumentasi transaksi, pelaporan, akses informasi, verifikasi, pengawasan, hingga pembagian tanggung jawab.

Pembagian Peran dan Integrasi Data

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan fungsi antaraktor dalam siklus pengelolaan informasi keuangan. Pengelola wisata dan pelaku UMKM berada paling dekat dengan sumber

transaksi karena terlibat langsung dalam penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari aktivitas ekonomi. Pokdarwis memiliki posisi penting dalam koordinasi, pengolahan informasi, pelaporan, dan pengawasan. Pemerintah desa terutama berperan dalam fungsi pembinaan, verifikasi, dan pengawasan, sedangkan masyarakat lokal berperan sebagai penerima informasi, bagian dari pengawasan partisipatif, serta pihak yang berkepentingan terhadap distribusi manfaat ekonomi. Pola tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengelolaan informasi tidak berada pada satu aktor, tetapi tersebar pada beberapa stakeholder dengan tanggung jawab yang berbeda.

Tabel 5. Joint Display Integrasi Data Kualitatif dan Kuantitatif

Dimensi	Bukti Kuantitatif	Bukti Kualitatif	Interpretasi Terintegrasi
Praktik pencatatan	65% manual	Mekanisme berbeda antaraktor	Belum terstandarisasi
Penggunaan teknologi	35% digital untuk pencatatan	Teknologi dominan untuk komunikasi	Akses digital tinggi, penggunaan akuntansi rendah
Kemampuan digital	40% mampu aplikasi pencatatan	Kemampuan antaraktor berbeda	Teknologi harus sederhana
Kebutuhan informasi	90% membutuhkan laporan periodik	Penerimaan-pengeluaran paling dibutuhkan	Pelaporan sederhana menjadi prioritas
Transparansi	40% akses informasi memadai	Informasi tersebar pada beberapa aktor	Perlu mekanisme distribusi informasi
Akuntabilitas	35% pelaporan periodik memadai	Bukti dan laporan belum konsisten	Perlu dokumentasi dan verifikasi
Partisipasi	Keterlibatan berbeda antaraktor	Pembagian peran belum sepenuhnya jelas	Perlu struktur kewenangan
Hambatan digitalisasi	40% mampu aplikasi pencatatan	Literasi dan konsistensi dominan	Implementasi sederhana dan bertahap

Integrasi data kuantitatif dan kualitatif menghasilkan tiga pola utama. Pertama, komunitas memiliki modal awal berupa kepemilikan perangkat, akses internet, dan kemampuan menggunakan teknologi komunikasi yang relatif tinggi. Kedua, modal digital tersebut belum diikuti oleh tingkat pemanfaatan teknologi yang sebanding untuk pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan informasi keuangan. Ketiga, tingginya kebutuhan informasi disertai dengan keterbatasan dalam pencatatan, pelaporan, verifikasi, pengawasan, serta pembagian tanggung jawab. Ketiga pola tersebut menjadi dasar empiris dalam mengidentifikasi karakteristik model akuntansi digital yang sesuai dengan konteks komunitas Desa Oluhuta.

Model Akuntansi Digital Berbasis Komunitas

Sintesis terhadap temuan kualitatif dan kuantitatif menghasilkan model akuntansi digital berbasis komunitas yang terdiri atas enam proses utama, yaitu pencatatan transaksi, pengolahan informasi, pelaporan keuangan, verifikasi dan pengawasan, distribusi informasi, serta pengambilan keputusan. Keenam proses tersebut disusun berdasarkan pola transaksi, kebutuhan informasi, kemampuan digital, kondisi tata kelola, serta pembagian peran antaraktor yang teridentifikasi dalam penelitian.

Pada tahap pencatatan transaksi, informasi dicatat pada sumber transaksi oleh aktor yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi, terutama pengelola wisata dan pelaku UMKM. Tahap pengolahan informasi dilakukan melalui pengelompokan data berdasarkan penerimaan, pengeluaran, aktor, dan jenis aktivitas, dengan fungsi rekapitulasi yang dapat dikoordinasikan oleh pengelola bersama Pokdarwis. Tahap pelaporan menghasilkan informasi mengenai penerimaan,

pengeluaran, saldo, transaksi utama, dan distribusi manfaat dalam format yang sederhana dan periodik.

Tahap verifikasi dan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian antara catatan, bukti transaksi, dan aktivitas ekonomi. Pokdarwis bersama pemerintah desa memiliki fungsi penting dalam proses verifikasi dan pengawasan, sedangkan komunitas dapat terlibat melalui mekanisme pengawasan partisipatif terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Tahap distribusi informasi mengatur penyampaian dan akses informasi sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing stakeholder. Informasi yang telah melalui proses pencatatan, pengolahan, pelaporan, dan verifikasi selanjutnya digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mengevaluasi kegiatan, menentukan kebutuhan operasional, menilai distribusi manfaat ekonomi, dan merumuskan keputusan pengelolaan berikutnya.

Tabel 6. Struktur Model Akuntansi Digital Berbasis Komunitas

Komponen	Aktor Utama	Mekanisme	Output/Fungsi
Pencatatan transaksi	Pengelola dan UMKM	Pencatatan pada sumber	Data transaksi; keterlacakan
Pengolahan informasi	Pengelola dan Pokdarwis	Klasifikasi dan rekapitulasi	Rekap transaksi; integrasi
Pelaporan keuangan	Pokdarwis/pengelola	Laporan sederhana dan periodik	Informasi keuangan; akuntabilitas
Verifikasi & pengawasan	Pokdarwis dan pemerintah desa	Pencocokan catatan-bukti	Informasi terverifikasi; pengendalian
Distribusi informasi	Pengelola/Pokdarwis	Akses sesuai kebutuhan	Informasi stakeholder; transparansi
Pengambilan keputusan	Stakeholder terkait	Evaluasi informasi bersama	Keputusan partisipatif

Model tersebut dibangun berdasarkan enam prinsip, yaitu partisipatif, sederhana dan mudah diakses, transparan, akuntabel, terintegrasi, serta berorientasi pada keberlanjutan. Prinsip partisipatif menempatkan setiap aktor sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam siklus informasi. Prinsip kesederhanaan dan kemudahan akses merespons perbedaan antara tingginya akses terhadap teknologi dasar dan masih terbatasnya kemampuan menggunakan teknologi untuk pencatatan keuangan. Prinsip transparansi diwujudkan melalui mekanisme distribusi informasi, sedangkan akuntabilitas didukung melalui dokumentasi, pelaporan, verifikasi, pengawasan, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Prinsip integrasi diarahkan untuk menghubungkan informasi yang sebelumnya tersebar pada masing-masing aktor, sedangkan orientasi keberlanjutan menempatkan informasi keuangan sebagai dasar untuk meningkatkan keterlacakan aliran nilai, pengelolaan distribusi manfaat ekonomi, dan keberlanjutan tata kelola CBT.

PEMBAHASAN

Kesenjangan Akses Digital dan Digitalisasi Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara ketersediaan teknologi digital dan pemanfaatannya untuk pengelolaan informasi keuangan. Seluruh responden memiliki telepon pintar dan menggunakan aplikasi komunikasi, serta 90% memiliki akses internet. Namun, hanya 35% yang menggunakan perangkat digital untuk pencatatan dan 15% menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan. Dominasi pencatatan manual sebesar 65% semakin memperlihatkan bahwa ketersediaan teknologi belum secara otomatis menghasilkan digitalisasi fungsi akuntansi. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai *digital utilization gap*, yaitu kesenjangan antara kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi secara umum dengan kemampuan memanfaatkannya secara konsisten untuk pencatatan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan.

Temuan tersebut sejalan dengan Huy dan Phuc (2025) yang menunjukkan bahwa manfaat sistem informasi akuntansi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh keterhubungannya dengan proses pengelolaan dan ekosistem organisasi. Dalam konteks Desa Oluhuta, temuan penelitian memberikan penjelasan yang lebih spesifik bahwa adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari belum identik dengan pelebagaan teknologi dalam proses akuntansi. Telepon pintar, aplikasi komunikasi, dan pembayaran digital telah digunakan oleh sebagian besar komunitas, tetapi penggunaannya belum berkembang menjadi praktik pencatatan dan pelaporan yang terstruktur. Artinya, persoalan utama tidak terletak pada keberadaan perangkat, melainkan pada kemampuan mengubah akses digital menjadi praktik pengelolaan informasi yang rutin dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan tersebut juga relevan dengan Du et al. (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi tidak selalu meningkatkan transparansi secara otomatis dan bahkan dapat menimbulkan beban informasi ketika kompleksitas teknologi melampaui kapasitas pengguna. Pada Desa Oluhuta, literasi akuntansi, konsistensi pencatatan, dan kemampuan digital justru muncul sebagai tantangan yang lebih dominan dibandingkan keterbatasan akses internet. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi pada komunitas pariwisata merupakan proses sosio-teknis. Teknologi perlu berjalan bersama prosedur pencatatan yang sederhana, kemampuan memahami informasi, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme verifikasi dan pengawasan. Oleh karena itu, kesesuaian teknologi dengan kapasitas komunitas menjadi lebih penting daripada tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan.

Kesenjangan Kebutuhan Informasi dan Praktik Pelaporan

Temuan berikutnya menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara kebutuhan informasi keuangan dan kemampuan praktik pengelolaan saat ini dalam menyediakan informasi tersebut. Sebanyak 90% responden membutuhkan informasi penerimaan dan laporan keuangan periodik, sedangkan hanya 30% yang telah menyusun rekapitulasi atau laporan secara periodik dan hanya 35% yang menilai pelaporan periodik telah memadai. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai *information demand–reporting gap*, yaitu kesenjangan antara tingginya kebutuhan komunitas terhadap informasi dengan keterbatasan proses pencatatan dan pelaporan dalam menghasilkan informasi secara teratur.

Kesenjangan tersebut penting karena informasi dalam CBT tidak hanya dibutuhkan untuk mengetahui penerimaan, pengeluaran, saldo, atau kondisi keuangan individual. Informasi juga memiliki fungsi tata kelola karena memungkinkan komunitas mengetahui dari mana nilai ekonomi diperoleh, bagaimana sumber daya digunakan, bagaimana transaksi dikelola, dan bagaimana manfaat pariwisata didistribusikan. Dengan demikian, kebutuhan terhadap informasi periodik menunjukkan bahwa komunitas membutuhkan mekanisme yang mampu mengubah transaksi yang tersebar menjadi informasi yang dapat digunakan secara bersama dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Alassuli et al. (2025) menunjukkan bahwa transformasi digital akuntansi dapat memperkuat transparansi ketika didukung oleh tata kelola yang memadai. Temuan Desa Oluhuta menunjukkan bahwa terdapat tahapan yang lebih mendasar sebelum manfaat tersebut dapat diperoleh. Digitalisasi baru dapat mendukung transparansi apabila terdapat proses pencatatan, dokumentasi, pengolahan, pelaporan, verifikasi, dan distribusi informasi yang berjalan secara konsisten. Dengan demikian, teknologi bukan titik awal tunggal bagi transparansi. Teknologi menjadi efektif ketika ditempatkan dalam struktur informasi yang menentukan bagaimana data dihasilkan, diperiksa, disampaikan, dan digunakan.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Perspektif Stakeholder

Seluruh indikator transparansi dan akuntabilitas dalam penelitian berada pada tingkat 50% atau lebih rendah. Akses informasi, dokumentasi transaksi, pelaporan periodik, mekanisme verifikasi, pengawasan, dan kejelasan penanggung jawab belum menunjukkan kondisi yang kuat. Pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata kelola tidak dapat dijelaskan hanya sebagai akibat dari belum digunakannya aplikasi digital. Keterbatasan terjadi pada keseluruhan siklus informasi, mulai dari pencatatan dan dokumentasi, pelaporan, akses informasi, verifikasi, pengawasan, hingga pembagian tanggung jawab. Dengan demikian, perubahan media dari pencatatan manual menuju

media elektronik tanpa perbaikan mekanisme tata kelola berpotensi hanya memindahkan persoalan yang sama ke dalam format digital.

Dalam perspektif *Stakeholder Theory*, temuan tersebut penting karena aktivitas ekonomi CBT melibatkan aktor dengan kepentingan, kewenangan, kapasitas, dan kebutuhan informasi yang berbeda (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan stakeholder bukan hanya berkaitan dengan kepentingan terhadap destinasi, tetapi juga dengan posisi mereka dalam siklus informasi keuangan. Pengelola wisata dan pelaku UMKM berada paling dekat dengan sumber transaksi, Pokdarwis memiliki posisi penting dalam pengolahan dan pelaporan, pemerintah desa berperan dalam verifikasi dan pengawasan, sedangkan masyarakat lokal menjadi penerima informasi sekaligus bagian dari pengawasan partisipatif.

Temuan tersebut memberikan elaborasi terhadap penerapan *Stakeholder Theory* dalam konteks akuntansi berbasis komunitas. Teori tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi siapa stakeholder dan apa kepentingannya, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana fungsi informasi dan tanggung jawab didistribusikan di antara stakeholder. Akuntabilitas dengan demikian tidak sepenuhnya terletak pada satu aktor pengelola, melainkan terbentuk melalui hubungan antara pihak yang menghasilkan transaksi, pihak yang mengolah informasi, pihak yang melakukan verifikasi, dan pihak yang menggunakan serta mengawasi informasi. Dalam konteks ini, akuntabilitas dapat dipahami sebagai akuntabilitas relasional (*relational accountability*), yaitu akuntabilitas yang terbentuk melalui keterhubungan fungsi antarpihak sepanjang siklus informasi.

Argento et al. (2025) menempatkan transformasi digital sebagai perubahan yang membawa konsekuensi terhadap praktik akuntansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian memperkuat pandangan tersebut pada konteks komunitas dengan menunjukkan bahwa pencatatan digital tanpa mekanisme verifikasi hanya menghasilkan data dalam bentuk elektronik. Akuntabilitas memerlukan keterhubungan antara transaksi, bukti transaksi, pencatatan, pelaporan, verifikasi, pengawasan, dan keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut. Oleh karena itu, fungsi verifikasi dan pengawasan merupakan bagian substantif dari desain akuntansi digital berbasis komunitas, bukan sekadar fungsi tambahan setelah digitalisasi dilakukan.

Partisipasi Komunitas sebagai Fondasi Tata Kelola Informasi

Pembagian peran antaraktor menunjukkan bahwa komunitas bukan merupakan kelompok yang homogen. Setiap aktor memiliki kemampuan, kepentingan, akses informasi, serta fungsi yang berbeda dalam aktivitas pariwisata. Kondisi tersebut sesuai dengan karakter dasar CBT yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai bagian dari pengelolaan destinasi. Abreu et al. (2024), Giampiccoli dan Saayman (2018), serta Jackson (2025) menekankan pentingnya partisipasi lokal, pemberdayaan, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan dalam CBT. Sementara itu, Tosun (2006) mengingatkan bahwa keberadaan masyarakat dalam aktivitas pariwisata belum secara otomatis menunjukkan partisipasi yang substantif karena partisipasi dapat berlangsung dalam tingkatan dan bentuk yang berbeda.

Hasil penelitian memberikan dimensi tambahan terhadap pemaknaan partisipasi tersebut. Dalam model yang dihasilkan, partisipasi komunitas tidak hanya berlangsung melalui keterlibatan dalam aktivitas ekonomi atau pengelolaan destinasi, tetapi juga melalui tata kelola informasi keuangan. Komunitas dapat terlibat sebagai penghasil data transaksi, penyedia informasi, pihak yang menerima laporan, pelaku verifikasi dan pengawasan, serta pengguna informasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi dalam CBT tidak hanya dapat dipahami sebagai *participation in tourism management*, tetapi juga sebagai *participation in financial-information governance*.

Temuan ini memperluas penerapan konsep CBT dengan menunjukkan bahwa partisipasi yang substantif memerlukan akses dan posisi dalam siklus informasi yang mendukung pengelolaan destinasi. Masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi tetapi tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai penerimaan, penggunaan sumber daya, dan distribusi manfaat belum sepenuhnya berada dalam posisi partisipatif dalam tata kelola. Fan et al. (2024) menunjukkan bahwa partisipasi dalam tata kelola pariwisata perdesaan dipengaruhi oleh kemampuan, pengetahuan, kesempatan, dan struktur kelembagaan. Hal tersebut konsisten dengan temuan penelitian bahwa kemampuan digital, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan

merupakan bagian penting dalam pembentukan model. Oleh karena itu, model tidak dapat memberikan fungsi yang sama kepada seluruh aktor, tetapi perlu menempatkan setiap stakeholder sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Keterlacakan Rantai Nilai Ekonomi Hijau

Aktivitas pariwisata Desa Oluhuta membentuk rantai nilai yang menghubungkan pengelola wisata, pelaku UMKM, Pokdarwis, pemerintah desa, masyarakat lokal, dan wisatawan melalui penerimaan, pengeluaran, penyediaan barang dan jasa, serta distribusi manfaat ekonomi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi transaksi masih banyak dikelola pada tingkat masing-masing aktor. Akibatnya, nilai ekonomi yang dihasilkan melalui aktivitas pariwisata belum mudah dilihat sebagai satu aliran yang saling terhubung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi akuntansi dalam CBT tidak cukup berhenti pada pencatatan transaksi individual.

Lara-Morales dan Clarke (2024) menunjukkan bahwa analisis rantai nilai pariwisata berkelanjutan dapat digunakan untuk melihat hubungan antara aktivitas pariwisata, manfaat ekonomi dan sosial, serta pembangunan komunitas. Rivera dan Gutierrez (2019) juga menekankan pentingnya hubungan antaraktor dalam pembentukan rantai nilai ekowisata berkelanjutan. Hasil penelitian Desa Oluhuta menambahkan dimensi informasi akuntansi ke dalam perspektif tersebut. Agar penciptaan dan distribusi nilai dapat diketahui, transaksi perlu dapat ditelusuri sejak sumbernya, diklasifikasikan berdasarkan aktivitas dan aktor, dilaporkan, diverifikasi, dan dikaitkan dengan pihak yang menghasilkan maupun menerima manfaat.

Kebutuhan terhadap informasi distribusi manfaat ekonomi yang mencapai 85% menunjukkan bahwa komunitas tidak hanya membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan masing-masing usaha, tetapi juga membutuhkan gambaran mengenai bagaimana aktivitas pariwisata mendistribusikan manfaat ekonomi. Temuan tersebut melengkapi hasil Akibun et al. (2025) yang menunjukkan potensi Pantai Oluhuta dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus pentingnya sinergi antara pemerintah dan komunitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi tersebut membutuhkan infrastruktur tata kelola informasi keuangan yang memungkinkan aliran nilai diketahui dan ditelusuri.

Dalam konteks tersebut, konsep keterlacakan aliran nilai (*value traceability*) menjadi penghubung antara akuntansi digital dan rantai nilai ekonomi hijau. Keterlacakan tidak hanya berarti tersedianya catatan transaksi, tetapi kemampuan menghubungkan transaksi dengan sumbernya, aktor yang terlibat, proses pengelolaan, serta pihak yang memperoleh manfaat. Dalam kerangka ekonomi hijau, kemampuan tersebut relevan karena keberlanjutan bukan hanya berkaitan dengan penciptaan nilai, tetapi juga dengan kemampuan komunitas untuk mengetahui, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana nilai tersebut didistribusikan (Roblek et al., 2021; Wang et al., 2022).

Kontribusi Teoretis

Temuan penelitian memberikan tiga kontribusi teoretis yang saling berkaitan. Pertama, penelitian memperluas penerapan *Stakeholder Theory* dari fokus pada identifikasi aktor dan kepentingan menuju struktur peran stakeholder dalam siklus informasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder tidak hanya memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi juga menjalankan fungsi informasi yang berbeda. Pengelola dan UMKM menghasilkan transaksi, Pokdarwis berperan dalam pengolahan dan pelaporan, pemerintah desa mendukung verifikasi dan pengawasan, sedangkan masyarakat menerima informasi dan terlibat dalam pengawasan partisipatif. Dengan demikian, efektivitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh keberadaan stakeholder, tetapi oleh keterhubungan fungsi mereka dalam menghasilkan, memverifikasi, mendistribusikan, dan menggunakan informasi. Kontribusi ini mengarah pada pemahaman akuntabilitas sebagai proses relasional yang dibangun melalui keterhubungan antarpihak.

Kedua, penelitian memberikan elaborasi terhadap konsep partisipasi dalam CBT dengan menunjukkan bahwa partisipasi komunitas juga berlangsung dalam tata kelola informasi keuangan. Konsep partisipasi dengan demikian tidak berhenti pada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata, pengelolaan destinasi, atau penerimaan manfaat ekonomi. Partisipasi juga mencakup kemampuan untuk menghasilkan informasi, memperoleh akses terhadap informasi, melakukan

pengawasan, dan menggunakan informasi dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi yang substantif dalam CBT memiliki dimensi informasi dan akuntabilitas yang perlu diperhatikan dalam tata kelola komunitas.

Ketiga, penelitian menghubungkan akuntansi digital dengan perspektif rantai nilai ekonomi hijau melalui konsep *value traceability*. Akuntansi digital tidak hanya diposisikan sebagai sarana efisiensi pencatatan, tetapi sebagai mekanisme yang memungkinkan aliran transaksi dan distribusi manfaat di antara stakeholder dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditelusuri. Dengan posisi tersebut, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya keluaran administratif dari kegiatan pelaporan, tetapi menjadi mekanisme yang mendukung keterlacakan dan tata kelola distribusi nilai dalam CBT. Ketiga kontribusi tersebut menempatkan model akuntansi digital berbasis komunitas sebagai arsitektur tata kelola informasi sosio-teknis yang menghubungkan teknologi, struktur stakeholder, partisipasi komunitas, akuntabilitas, dan keterlacakan nilai.

Implikasi Praktis Berbasis Temuan

Implikasi praktis yang berasal langsung dari temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi digital di Desa Oluhuta perlu dimulai dari mekanisme yang sederhana dan bertahap. Tingginya kepemilikan telepon pintar dan penggunaan aplikasi komunikasi menunjukkan tersedianya modal awal untuk digitalisasi, tetapi keterbatasan literasi akuntansi, konsistensi pencatatan, dan kemampuan membuat rekapitulasi digital menunjukkan bahwa implementasi tidak sebaiknya dimulai dari sistem yang kompleks. Prioritas awal adalah membangun rutinitas pencatatan, dokumentasi bukti transaksi, penyusunan laporan sederhana, serta peningkatan kemampuan dasar penggunaan teknologi untuk pengelolaan informasi keuangan.

Temuan mengenai pembagian peran juga menunjukkan perlunya struktur tanggung jawab yang jelas. Pengelola wisata dan pelaku UMKM dapat ditempatkan sebagai sumber utama pencatatan transaksi, Pokdarwis sebagai koordinator pengolahan dan pelaporan, pemerintah desa dalam fungsi verifikasi dan pengawasan, serta masyarakat sebagai penerima informasi dan bagian dari pengawasan partisipatif. Pembagian tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi partisipasi, tetapi untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam siklus informasi memiliki aktor yang bertanggung jawab.

Keluaran informasi perlu diprioritaskan pada kebutuhan yang paling banyak diidentifikasi oleh komunitas, terutama informasi penerimaan, pengeluaran, saldo, transaksi antaraktor, distribusi manfaat ekonomi, dan laporan periodik. Informasi tersebut perlu tersedia dalam format yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat diakses sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing stakeholder. Pendekatan tersebut memungkinkan digitalisasi berfungsi tidak hanya sebagai perubahan media pencatatan, tetapi sebagai mekanisme yang memperkuat keteraturan informasi, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan komunitas.

Rekomendasi Pengembangan Model

Berbeda dengan implikasi praktis yang diturunkan langsung dari temuan, pengembangan sistem atau aplikasi tertentu merupakan rekomendasi konseptual yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Model yang dihasilkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan prototipe akuntansi digital berbasis komunitas yang mengintegrasikan pencatatan transaksi, rekapitulasi, pelaporan periodik, verifikasi, distribusi informasi, dan penyajian informasi mengenai distribusi manfaat ekonomi. Namun, bentuk teknologi, antarmuka, mekanisme penyimpanan data, serta tingkat integrasi sistem perlu diuji melalui tahap pengembangan dan implementasi tersendiri. Pengembangan berikutnya juga perlu mempertimbangkan kemampuan penggunaan pada kondisi konektivitas yang terbatas, perbedaan kapasitas digital antaraktor, keamanan dan kewenangan akses informasi, serta kemudahan penggunaan. Dengan demikian, model penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai dasar konseptual dan empiris bagi pengembangan sistem, bukan sebagai aplikasi yang telah teruji secara operasional.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi pada pariwisata berbasis komunitas (CBT) bukan sekadar mengganti pencatatan manual dengan aplikasi. Di Desa Oluhuta, kebutuhan

utamanya ialah tata kelola yang mengubah transaksi dari berbagai aktor menjadi informasi keuangan yang terstruktur, dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipakai untuk mengambil keputusan. Keberhasilannya bergantung pada kapasitas pengguna, pembagian peran, serta mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pengawasan.

Integrasi temuan kualitatif dan kuantitatif menghasilkan model konseptual berbentuk siklus: **pencatatan transaksi → pengolahan dan pelaporan → verifikasi dan pengawasan → distribusi informasi → pengambilan keputusan**. Model ini menempatkan komunitas sebagai pusat tata kelola, dengan teknologi sebagai alat pendukung. Prinsipnya ialah partisipasi, kemudahan akses, transparansi, akuntabilitas, keterpaduan, dan keberlanjutan. Akuntabilitas terbentuk dari hubungan antaraktor dalam siklus tersebut, sementara partisipasi mencakup pengelolaan informasi keuangan, bukan hanya kegiatan wisata. Keterlacakan transaksi dan distribusi manfaat menghubungkan akuntansi digital dengan rantai nilai ekonomi hijau.

Karena penelitian dilakukan di satu lokasi dan analisis kuantitatifnya bersifat deskriptif, model ini **belum teruji secara operasional** dan belum dapat digeneralisasi ke semua desa wisata. Penelitian berikutnya perlu mengembangkan prototipe, mengujinya di lokasi lain, serta menilai kemudahan penggunaan, kualitas informasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterlacakan manfaat ekonomi, dan dukungannya terhadap tata kelola rantai nilai ekonomi hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abreu, L. A. d., Walkowski, M. d. C., Perinotto, A. R. C., & Fonseca, J. F. d. (2024). Community-based tourism and best practices with the Sustainable Development Goals. *Administrative Sciences*, 14(2), Article 36. <https://doi.org/10.3390/admsci14020036>
- Akibun, F., Kida, R. M., & Mokodongan, R. (2025). Pengaruh wisata Pantai Oluhuta terhadap pendapatan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 12(2), 863–873. <https://doi.org/10.37606/publik.v12i2.1778>
- Alassuli, A., Thuneibat, N. S., Eltweri, A., Al-Hajaya, K., & Alghraibeh, K. (2025). The impact of accounting digital transformation on financial transparency: Mediating role of good governance. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(5), Article 272. <https://doi.org/10.3390/jrfm18050272>
- Argento, D., Dobija, D., Grossi, G., Marrone, M., & Mora, L. (2025). The unaccounted effects of digital transformation: Implications for accounting, auditing and accountability research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 38(3), 765–796. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2025-7670>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65–91. <https://doi.org/10.5465/AMR.1995.9503271992>
- Du, X., Hong, J., Tao, H., & Zhang, Y. (2024). Is digital finance always beneficial to accounting information transparency? Evidence from China. *China Journal of Accounting Studies*, 12(2), 276–310. <https://doi.org/10.1080/21697213.2024.2347234>
- Fan, P., Ren, L., & Zeng, X. (2024). Resident participation in environmental governance of sustainable tourism in rural destination. *Sustainability*, 16(18), Article 8173. <https://doi.org/10.3390/su16188173>
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs—Principles and practices. *Health Services Research*, 48(6, Pt. 2), 2134–2156. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12117>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 7(4), 1–27.
- Huy, P. Q., & Phuc, V. K. (2025). Does effectiveness of digital accounting system intensify sustainable business model innovation with mediating role of digital business ecosystem?

- Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 14(1), Article 3. <https://doi.org/10.1186/s13731-024-00444-x>
- Jackson, L. A. (2025). Community-based tourism: A catalyst for achieving the United Nations Sustainable Development Goals One and Eight. *Tourism and Hospitality*, 6(1), Article 29. <https://doi.org/10.3390/tourhosp6010029>
- Lara-Morales, O., & Clarke, A. (2024). Sustainable tourism value chain analysis as a tool to evaluate tourism's contribution to the Sustainable Development Goals and local Indigenous communities. *Journal of Ecotourism*, 23(2), 129–147. <https://doi.org/10.1080/14724049.2022.2147189>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Raynaldi, R., Malihah, E., & Andari, R. (2024). Analysis of community-based tourism (CBT) sustainability in Karedok Tourism Village, Jatigede District, Sumedang Regency. *Media Wisata*, 22(1), 52–63. <https://doi.org/10.36276/mws.v22i1.582>
- Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2019). A framework toward sustainable ecotourism value chain in the Philippines. *Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism*, 20(2), 123–142. <https://doi.org/10.1080/1528008X.2018.1492495>
- Roblek, V., Drpić, D., Meško, M., & Miložica, V. (2021). Evolution of sustainable tourism concepts. *Sustainability*, 13(22), Article 12829. <https://doi.org/10.3390/su132212829>
- Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493–504. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>
- Wang, Y., Wang, Y., & Fan, P. (2022). Analysis of micro value flows in the value chain of eco-innovation in agricultural products. *Sustainability*, 14(13), Article 7971. <https://doi.org/10.3390/su14137971>